

ABSTRAK SKRIPSI

Nama Fanny Novitha Todike, NPM. 91611403161042, Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum, Dosen Pembimbing Darmi L.Penyami,SH.,MH, dan Albert Morangki, SH.,MH

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum, KPPS memiliki tugas dan kewenangan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KPPS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki tanggung jawab yang tinggi, karena menjadi titik awal dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah tata cara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ?. 2) Bagaimanakah tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum ?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tata cara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 2) Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan lebih spesifik lagi yakni tentang tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2019, KPPS dibentuk dengan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Wewenang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.



ABSTRACT

Fanny Novitha Todike, NPM. 91611403161042, Juridical Overview of the Duties and Authorities of Voting Organizing Groups in the Implementation of General Elections. Supervised by Darmi L. Penyami, SH., MH, and Albert Morangki, SH., MH

In holding general elections the Voting Organizing Group has the duty and authority to carry out the voting stages at the polling stations. KKPS has duties of authority in high responsibility, as it is the starting point for the success of holding an honest and fair election. The objectives to be achieved in this research are: 1) To determine the procedure for the formation of Voting Organizing Groups. 2) To find out the duties and authorities of the Voting Organizing Group in organizing general elections. The research method used is the Normative Juridical Research Method, which is legal research carried out by examining library materials, namely a scientific research procedure to determine the truth based on legal scientific logic from the normative side. The approach method used in this research is a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this study obtained that the procedures for the formation of Voting Organizing Groups are carried out in accordance with the provisions of article 30 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and General Election Commission regulations Number 32 of 2019, the Voting Organizing Group was formed by a PPS decision on behalf of the head of the Regency KPU

Keywords: General Election, Authority, Voting Organizing Group